

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM 35 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS  
EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK  
(*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;
- b. bahwa untuk penyesuaian Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik dengan adanya penurunan Harga Bahan Bakar Minyak per tanggal 1 April 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 169 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api;
  8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4738 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*).

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi, terdiri atas :
  - a. perkeretaapian antar kota; dan
  - b. perkeretaapian perkotaan.
- (2) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk iuran dana pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3

Setiap biaya tambahan selain yang diatur dalam Pasal 1 yang akan dijadikan komponen dari tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan terlebih dahulu.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara sarana perkeretaapian umum dapat dikenakan sanksi dalam hal memberlakukan tarif melampaui tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan PM. 23 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Lampiran I :
  - 1) Huruf A mulai berlaku Tanggal 1 April 2016 s.d 30 Juni 2016);
  - 2) Huruf B Mulai berlaku Per Tanggal 1 Juli 2016.
- b. Ketentuan Lampiran II mulai berlaku Per Tanggal 1 Januari 2016.
- c. Ketentuan Lampiran III :
  - A. Huruf A mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 s.d 30 September 2016.
  - B. Huruf B mulai berlaku Per tanggal 1 Oktober 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2016

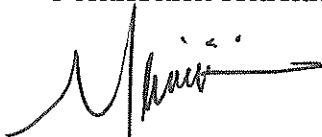
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 495

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
Pelaksana Harian



YENNESI ROSITA  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 19660716 199503 2 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 35 Tahun 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

**A. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI KA ANTARKOTA**

(Mulai berlaku Per Tanggal 1 April 2016 s/d 30 Juni 2016)

<b>NO</b>	<b>JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API</b>	<b>LINTAS</b>	<b>TARIF (Rp/Orang)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>KA JARAK JAUH</b>			
1	Logawa	Purwokerto –Sby Gubeng- Jember	<b>76.000</b>
2	Brantas	Kediri-Pasarsenen	<b>86.000</b>
3	Kahuripan	Kediri-Kiara condong	<b>86.000</b>
4	Bengawan	Purwosari-Pasarsenen	<b>76.000</b>
5	Pasundan	Surabayagubeng-Kiaracondong	<b>96.000</b>
6	Sri Tanjung	Lempuyangan-Banyuwangi	<b>96.000</b>
7	GBM Selatan	Surabayagubeng-Pasarsenen	<b>106.000</b>
8	Matarmaja	Malang-Pasarsenen	<b>111.000</b>
<b>KA JARAK SEDANG</b>			
9	Serayu	Purwokerto-Kroya-Jakartakota	<b>68.000</b>
10	Kutojaya Selatan	Kutoarjo-Kiaracondong	<b>63.000</b>
11	TawangAlun	Malang-Banyuwangi	<b>63.000</b>
12	Rajabasa	Kertapati-Tanjungkarang	<b>33.000</b>
13	Bukit Serelo /Buser	Kertapati-Lubuklinggau	<b>33.000</b>
14	Putri Deli	Tanjungbalai-Medan	<b>28.000</b>
15	SiantarEkspress	Medan-Siantar	<b>23.000</b>
16	Probowangi	Banyuwangi-Probolinggo-SurabayaGubeng	<b>58.000</b>
17	Probowangi	Banyuwangi-Probolinggo	<b>28.000</b>
18	Probowangi	Probolinggo- SurabayaGubeng	<b>30.000</b>
19	TegalEkspress	Pasarsenen - Tegal	<b>50.000</b>
20	Maharani	Surabayapasarturi-Semarangponcol	<b>50.000</b>

**B. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI KA ANTARKOTA**

(Mulai berlaku Per Tanggal 1 Juli 2016)

<b>NO</b>	<b>JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API</b>	<b>LINTAS</b>	<b>TARIF (Rp/Orang)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>KA JARAK JAUH</b>			
1	Logawa	Purwokerto -SbyGubeng- Jember	<b>74.000</b>
2	Brantas	Kediri-Pasarsenen	<b>84.000</b>
3	Kahuripan	Kediri-Kiaracondong	<b>84.000</b>
4	Bengawan	Purwosari-Pasarsenen	<b>74.000</b>
5	Pasundan	Surabayagubeng-Kiaracondong	<b>94.000</b>
6	Sri Tanjung	Lempuyangan-Banyuwangi	<b>94.000</b>
7	GBM Selatan	Surabayagubeng-Pasarsenen	<b>104.000</b>
8	Matarmaja	Malang-Pasarsenen	<b>109.000</b>
<b>KA JARAK SEDANG</b>			
9	Serayu	Purwokerto-Kroya-Jakartakota	<b>67.000</b>
10	Kutojaya Selatan	Kutoarjo-Kiaracondong	<b>62.000</b>
11	TawangAlun	Malang-Banyuwangi	<b>62.000</b>
12	Rajabasa	Kertapati-Tanjungkarang	<b>32.000</b>
13	Bukit Serelo /Buser	Kertapati-Lubuklinggau	<b>32.000</b>
14	Putri Deli	Tanjungbalai-Medan	<b>27.000</b>
15	SiantarEkspress	Medan-Siantar	<b>22.000</b>
16	Probowangi	Banyuwangi-Probolinggo-SurabayaGubeng	<b>56.000</b>
17	Probowangi	Banyuwangi-Probolinggo	<b>27.000</b>
18	Probowangi	Probolinggo- SurabayaGubeng	<b>29.000</b>
19	TegalEkspress	Pasarsenen - Tegal	<b>49.000</b>
20	Maharani	Surabayapasarturi-Semarangponcol	<b>49.000</b>

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
Pelaksana Harian



YENNESI ROSITA  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 19660716 199503 2 001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 35 Tahun 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN**

(Mulai berlaku Per tanggal 1 Januari 2016)

NO	JENIS ANGKUTAN/ KERETA API	NAMA	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)
1	2		3	4
<b>KA JARAK DEKAT/LOKAL</b>				
1	Merak Jaya/PatasMerak/BantenEkspres/Lokal		Merak-Angke	<b>8.000</b>
2	CilamayaEkspres/CepatPurwakarta		Purwakarta-Jakartakota	<b>6.000</b>
3	LokalRangkas/EkonomiLokal		Angke-Rangkasbitung	<b>5.000</b>
4	Rangkas Jaya		Rangkasbitung- Tanahabang/Angke	<b>5.000</b>
5	Jatiluhur		Cikampek-Jakartakota	<b>5.000</b>
6	WalahaEkspres/EkonomiLokal		Jakartakota-Purwakarta	<b>6.000</b>
7	EkonomiLokal/Cibatuan		Purwakarta-Cibatu	<b>8.000</b>
8	Bandung Raya Ekonomi		Kiaracondong-Cicalengka	<b>4.000</b>
9	Bandung Raya Ekonomi		Bandung-Padalarang	<b>4.000</b>
10	Bandung Raya Ekonomi		Bandung-Cicalengka	<b>4.000</b>
11	Bandung Raya Ekonomi		Cicalengka-Padalarang	<b>5.000</b>
12	Penataran		Surabayakota-Malang- Blitar	<b>15.000</b>
13	Dhoho		Surabayakota-Kertosono- Blitar	<b>15.000</b>
14	Penataran		Blitar-Malang- Surabayakota	<b>15.000</b>
15	Tumapel		Malang-Surabayakota	<b>10.000</b>
16	EkonomiLokal		Kertosono-Surabayakota	<b>10.000</b>
17	EkonomiLokal		Sidoarjo-Surabaya Ps.Turi- Bojonegoro	<b>12.000</b>
18	EkonomiLokal		Sidoarjo-SurabayaPs.Turi	<b>6.000</b>
19	EkonomiLokal		Surabaya Ps.Turi- Bojonegoro	<b>6.000</b>
20	Pandanwangi		Jember-Banyuwangi	<b>8.000</b>
21	Kalijaga		Purwosari- Semarangponcol	<b>10.000</b>



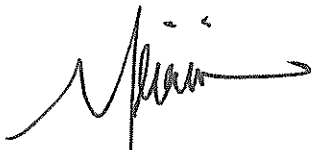
<b>NO</b>	<b>JENIS ANGKUTAN/ KERETA API</b>	<b>NAMA</b>	<b>LINTAS</b>	<b>TARIF (Rp/Orang)</b>
1	2		3	4
22	Sibinuang		Pariaman-Padang	<b>5.000</b>
<b>KRD</b>				
23	KRD		Sidotopo/Surabaya-Porong	<b>5.000</b>
24	KRD		Surabaya-Lamongan	<b>5.000</b>
25	Prameks		Yogyakarta/Lempuyangan-Solobalapan/Solojebres	<b>8.000</b>
26	Prameks		Lempuyangan/ Yogyakarta -Kutoarjo/Prembun	<b>8.000</b>
27	Prameks		Prembun/Kutoarjo-Solobalapan/Solojebres	<b>15.000</b>
28	Seminung		Kotabumi-TanjungKarang	<b>10.000</b>
29	Way Umpu		Tanjung Karang-Kotabumi	<b>10.000</b>
30	KedungSepur		Ngrombo-Semarang Poncol	<b>10.000</b>
31	Sri Lelawangsa		Medan-Binjai	<b>5.000</b>

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
Pelaksana Harian



YENNESI ROSITA  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 19660716 199503 2 001

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 35 Tahun 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
PERKOTAAN  
WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, DAN  
RANGKASBITUNG**

**A. (Mulai Berlaku 1 Januari 2016 s.d 30 September 2016)**

<b>NO</b>	<b>JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API</b>	<b>LINTAS</b>	<b>TARIF Rp/orang</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	KRL	1 – 25 Km Pertama	2.000
2.	KRL	10 Km berikutnya dan berlaku kelipatan	1.000

**B. (Mulai Berlaku Per tanggal 1 Oktober 2016)**

<b>NO</b>	<b>JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API</b>	<b>LINTAS</b>	<b>TARIF Rp/orang</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	KRL	1 – 25 Km Pertama	3.000
2.	KRL	10 Km berikutnya dan berlaku kelipatan	1.000

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
Pelaksana Harian



YENNESI ROSITA  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 19660716 199503 2 001